

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI PERTANIAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19¹

Sahat M. Pasaribu

Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Korespondensi: sahatp@gmail.com

Pendahuluan

Dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia saat ini telah dan sedang dirasakan juga oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, virus corona yang berbahaya ini telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Sektor pertanian termasuk menjadi pusat perhatian, khususnya dalam hal pasokan bahan pangan yang sangat diperlukan sebagai kebutuhan dasar dalam menghadapi situasi perekonomian yang semakin sulit.

Petani maupun peternak tidak terlepas dari ancaman Covid-19 dalam aktivitasnya sebagai produsen usaha pertanian. Meskipun ada kekhawatiran petani akan tertular Covid-19, namun dengan semua keterbatasan yang dihadapi, usaha pertanian terus dilakukan. Resiliensi sektor pertanian kembali diuji pada masa-masa sulit seperti saat ini sebagaimana halnya pada masa resesi ekonomi pada masa yang lalu. Kebijakan yang diambil Kementerian Pertanian menjadi tumpuan harapan pengamanan pasokan produk pertanian/pangan untuk memenuhi permintaan konsumsi di dalam negeri.

Program asuransi pertanian adalah salah satu instrumen perlindungan petani yang melibatkan pemerintah (pengendali program dan bantuan premi asuransi kepada petani), perusahaan asuransi (penyelenggara kegiatan dan penanggung risiko), serta petani (penerima manfaat). Kerja sama antarkementerian (Kementan, Kemenkeu, dan Kemen BUMN) dalam implementasi program asuransi pertanian telah menunjukkan kinerja yang saling mendukung dan sekaligus memberi contoh praktek kemitraan yang baik antara pemerintah dengan swasta (penerapan konsep PPP, public-private partnership).

UU No. 19/2013 di antaranya mengamanatkan perlindungan terhadap petani dan dilaksanakan melalui asuransi. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian (Pasal 39).

¹ Tulisan ini adalah pendapat pribadi

Ringkasan

Pasokan produksi pangan mendapat perhatian yang besar di tengah pandemi Covid-19 saat ini karena ketersediaannya sangat signifikan menjaga stabilitas sosial ekonomi nasional. Produksi pangan (dan ternak) dilindungi dari risiko kerugian karena kerusakan tanaman (atau kematian ternak) dengan penerapan skema asuransi. Asuransi pertanian adalah salah satu instrumen kebijakan untuk melindungi kepentingan petani. Tulisan ini membahas strategi pelaksanaan program asuransi pertanian di tengah wabah virus corona untuk menjamin keberlanjutan usaha tani. Pembahasan dilakukan secara deskriptif berdasarkan data sekunder dengan informasi yang relevan lainnya. Petani/peternak terus menunjukkan keinginan berasuransi karena manfaat yang dapat diberikannya, seperti ditunjukkan oleh pelaksanaan skema AUTP (padi) dan AUTS/K (sapi/kerbau). Kementerian Pertanian perlu terus mendorong penerapan dan pengembangan asuransi pertanian untuk memberikan ketenangan berusaha tani/beternak, meningkatkan produksi, dan memperbaiki kesejahteraan petani/peternak. Strategi pelaksanaan program asuransi pertanian di tengah pengaruh Covid-19 di antaranya mencakup: (a) upaya peningkatan peserta asuransi dengan data yang akurat, (b) perbaikan pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan advokasi, (c) penyediaan anggaran bantuan premi, (d) pengintegrasian program asuransi pertanian ke dalam skema kredit, (e) pengembangan aplikasi asuransi untuk komoditas strategis (seperti jagung, bawang merah, serta kambing dan domba), (f) pemanfaatan sistem informasi dan teknologi (drone) serta dukungan terhadap kemitraan usaha (PPP), dan (g) pengembangan model asuransi berbasis produktivitas (yield-based insurance model).

© Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), 2020.

Policy Brief ini dapat secara bebas dikutip atau dicetak ulang, selama mencantumkan sumbernya.

Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang memberikan ganti rugi, sehingga petani memiliki modal kerja dan tetap bisa melakukan kegiatan usaha tani/usaha ternaknya. Asuransi pertanian memberikan ketenangan dan kepastian berusaha tani secara berkesinambungan.

Di tengah pengaruh Covid-19 saat ini, strategi pelaksanaan program asuransi pertanian perlu diperbarui dan disusun agar lebih terarah dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan. Tulisan ini membahas strategi di atas dan merumuskannya untuk diusulkan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan kebijakan perlindungan usaha pertanian.

Tinjauan Kebijakan

Terbatasnya pergerakan ekonomi akibat Covid-19 saat ini memperkuat dugaan bahwa ketersediaan dan distribusi bahan pangan akan mengalami gangguan dengan kecenderungan permintaan yang meningkat. Kondisi ini diperkirakan akan mengangkat harga ke tingkat lebih tinggi, terutama bahan pangan beras, meskipun selisih harganya tidak dinikmati langsung oleh petani. Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan produksi pertanian selalu dihadapkan pada risiko kerusakan tanaman atau kegagalan panen atau kematian ternak karena keadaan yang sulit dikendalikan.

Pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan amanat UU No. 19/2013 yang berpengaruh pada kelambatan pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan advokasi tentang pelaksanaan asuransi pertanian. Jika terus berlanjut, situasi ini diperkirakan dapat menimbulkan kendala peningkatan produksi pertanian ke pada masa depan. Demikian juga, bantuan premi yang seharusnya juga difasilitasi pemerintah daerah, sampai saat ini secara umum masih menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Hingga sekarang, asuransi pertanian hanya dilaksanakan pada dua komoditas, yakni padi (2015) dan sapi/kerbau (2016). Padahal perlindungan yang sama untuk komoditas strategis lainnya, seperti jagung, bawang merah, serta kambing/domba sangat diharapkan oleh petani/peternak. Model asuransi pertanian yang diaplikasikan saat ini juga baru terbatas pada penggantian kerugian atas biaya produksi (*indemnity-based insurance model*), belum ada alternatif model lain yang dapat diterapkan sebagai opsi menguntungkan bagi petani.

Dalam arahnya pada 21 April 2020, Presiden RI sudah meminta untuk secara sungguh-sungguh memerhatikan pasokan bahan pangan dan menghitung secara cermat ketersediaannya. Ini merupakan perintah yang disampaikan termasuk kepada jajaran Kementerian Pertanian untuk dilaksanakan. Keputusan politik ini sangat berkaitan dengan pengamanan produksi pangan dan distribusinya agar permintaan dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Informasi tentang ketersediaan bahan pangan (Tabel 1) memperlihatkan optimisme surplus, terutama beras, jagung, dan daging sapi. Meskipun demikian, perkiraan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan hingga Agustus 2020 yang terlihat aman ini masih dibayangi oleh kemungkinan risiko gangguan, di antaranya: (a) ketersediaan, karena permintaan yang cenderung meningkat, dan (b) penurunan produksi, karena risiko bencana alam (kekeringan seperti prakiraan BMKG) dan serangan OPT (prakiraan BBPOPT). Untuk mengamankan produksi di tengah risiko dalam musim tanam sekarang (MK2), petani memerlukan jaminan perlindungan usaha tani agar terhindar dari kerugian.

Laporan peramalan BBPOPT mengindikasikan terjadinya serangan OPT utama padi pada MT 2020 (Gambar 1), demikian juga dengan prakiraan BMKG yang menunjukkan bahwa bulan Juli-Agustus merupakan periode krusial karena merupakan puncak ancaman kemarau (Gambar 2). Dengan atau tanpa prediksi kondisi iklim dan serangan OPT tersebut, petani/peternak akan terus bekerja dan sasaran asuransi seluas 1 juta hektar pada skema AUTP dan 140.000 ekor untuk AUTS/K harus tetap menjadi target untuk menjamin ketersediaan dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Penerapan skema AUTP dan AUTS/K telah disambut baik oleh petani dan terbukti mampu melindungi petani dari kerugian karena risiko kerusakan tanaman/gagal panen/kematian ternak. Pada skema AUTP, kerusakan tanaman yang ditanggung adalah risiko karena kebanjiran, kekeringan, atau serangan OPT. Pada skema AUTS/K, jenis risiko yang ditanggung adalah kematian ternak. Besaran premi dan klaim ditunjukkan dalam Tabel 2.

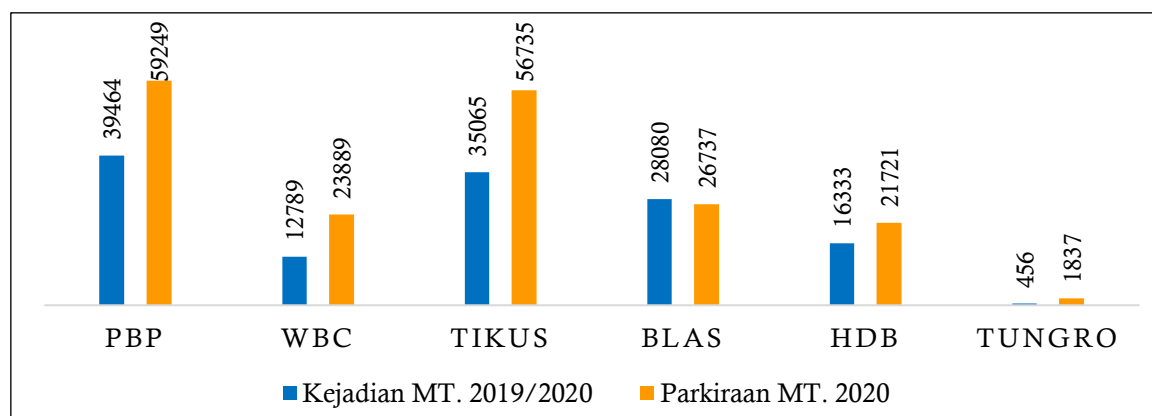
Tabel 1. Perkiraan ketersediaan dan kebutuhan komoditas strategis periode Juni-Agustus 2020 (ton)

No.	Komoditas	Perkiraan ketersediaan			Perkiraan kebutuhan	Perkiraan neraca s.d. Agustus 20	
		Stok akhir Mei 20	Perkiraan produksi	Rencana impor			
1	Beras	7.775.886	7.965.923		15.741.809	7.492.056	8.249.753
2	Jagung	4.327.545	4.807.119		9.134.664	4.599.959	4.534.705
3	Bawang merah	240.523	415.146		655.669	354.094	301.575
4	Bawang putih*	116.306	14.801	34.858	165.965	146.444	19.521
5	Cabai besar		294.758		294.758	273.713	21.045
6	Cabai rawit		282.878		282.878	251.998	30.880
7	Daging sapi/kerbau	62.850	107.798	180.752	351.400	192.110	159.290
8	Daging ayam ras	204.632	992.764		1.197.396	854.604	342.792
9	Telur ayam ras	24.906	1.268.117		1.293.023	1.203.041	89.982
10	Gula pasir	563.521	1.595.571		2.159.092	691.436	1.467.656
11	Minyak goreng	12.861.142	8.412.132		21.273.274	2.299.897	18.973.377

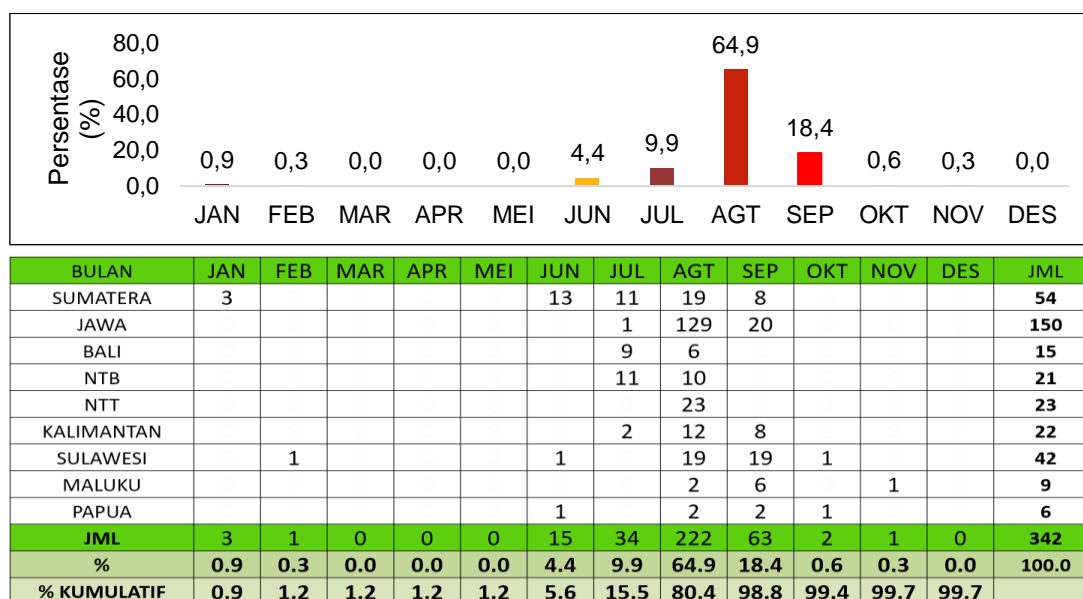
Keterangan: * Masih diperlukan tambahan penerbitan RIPH dan PI baru

Catatan: Seharusnya beras 8.345.640 ton dan jagung 4.410.732 ton

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 18 Maret 2020



Gambar 1. Perkiraan serangan OPT utama padi MT 2020 (Sumber: BBPOPT, 2020)



Sumber: BMKG, 2020)

Gambar 2. Prakiraan puncak musim kemarau 2020 berdasarkan jumlah ZOM (zona musim)

Tabel 2. Premi dan klaim skema AUTP dan AUTS/K

No.	Skema	Premi (Rp)		Jenis risiko yang ditanggung	Klaim (Rp000)
		Petani (20%)	Pemerintah (80%)		
1.	AUTP	36.000	144.000	Banjir, kekeringan, OPT	6.000/ha/MT
2.	AUTS/K	40.000	160.000	Kematian: penyakit, kecelakaan, kehilangan	hingga 10.000/ekor/tahun

Permintaan aplikasi asuransi pertanian mulai awal tahun ini terus meningkat sejalan dengan kebutuhan petani/peternak terhadap perlindungan usaha taninya. Realisasi pada bulan April 2019 dibandingkan dengan pencapaian pada bulan yang sama tahun 2020 menunjukkan (a) kerja sama yang semakin baik antarpemangku kepentingan, (b) minat berasuransi petani/peternak yang semakin tinggi, dan (c) semakin berfungsinya aplikasi online Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) seperti data pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi skema AUTP dan AUTS/K 2019-2020

No.	Skema	Realisasi 2019 (30 Apr)	Realisasi 2020 (14 Apr)	Perubahan (%)
1.	AUTP (ha)	129.387,86	295.635,85	58
2.	AUTS/K (ekor)	7.553	20.998	64

Catatan: Mengikuti aplikasi *online* SIAP

Penutup

Penerapan asuransi pertanian sangat logis dilaksanakan di tengah ancaman Covid-19 karena memberikan ketenangan berusaha tani/beternak. Dalam situasi seperti ini, Kementerian Pertanian hadir untuk membantu petani/peternak dan menunjukkan keberpihakannya kepada petani/rakyat. Keberhasilan berproduksi petani/eternak dalam penyediaan bahan pangan/daging akan mendorong ketersediaan bahan pangan memenuhi permintaan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Petani perlu terus dilindungi meskipun kondisi iklim tidak terlalu mengkhawatirkan dengan minimalnya kejadian banjir, namun harus tetap mewaspadai kondisi kemarau (dengan puncak kemarau Juli-Agustus). Dalam konteks perlindungan petani ini, strategi pelaksanaan program asuransi pertanian di tengah pengaruh Covid-19 (diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021) dapat direkomendasikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Meskipun penghematan pengeluaran negara karena Covid-19 harus dilakukan, anggaran Kementerian Pertanian untuk membantu premi asuransi petani/peternak perlu dipertahankan dan target skema AUTP tahun 2020 (seluas 1 juta hektar) dan AUTS/K (140.000 ekor) diusulkan untuk tidak berubah karena target tersebut sangat relevan dengan kebutuhan penyediaan bahan pangan saat ini atau beberapa bulan ke depan.
- Bantuan premi sebesar 80% untuk skema AUTP dan AUTS/K masih akan ditanggung pemerintah pusat dan 20% sisanya dibayarkan petani sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi anggota asuransi. Pola ini sudah berjalan lancar seperti ditunjukkan oleh pendaftaran yang melampaui target hingga 14 April 2020 yang lalu.
- Upaya untuk mengintegrasikan program asuransi pertanian ke dalam skema kredit mengikuti fasilitas yang tersedia pada program KUR akan sangat relevan dengan perluasan penerapan asuransi pertanian. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan termasuk ketersediaan payung hukum serta mekanisme penyelenggaraannya perlu disiapkan. Jika berjalan dengan baik, petani/peternak dapat sepenuhnya (100%) membiayai sendiri premi asuransinya karena beban premi dapat menjadi bagian dari paket kredit yang diambil petani/peternak. Dengan integrasi premi ke dalam paket KUR, beban alokasi bantuan premi (dari pemerintah pusat) dapat dihilangkan/teralihkan menjadi bagian dari dukungan bunga kredit KUR kepada perbankan.

- d. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian saat ini telah memiliki informasi awal dari hasil kajian tentang asuransi untuk komoditas strategis jagung, kedelai, cabai, bawang merah, tebu, kakao, serta kambing dan domba. Pengembangan asuransi pertanian diusulkan agar segera diprioritaskan pada komoditas strategis jagung, bawang merah, dan kambing/domba dan perlu didorong agar segera diujicobakan sebelum diimplementasikan pada skala yang lebih luas.
- e. Model asuransi selain indemnity-based, seperti asuransi berbasis produktivitas (yield-based insurance model) diusulkan agar segera disusun dan diperkenalkan kepada petani/peternak. Pemangku kepentingan dari instansi terkait, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, BMKG, dan Kementerian Pertanian diminta agar bekerja sama menghasilkan model alternatif asuransi berbasis produktivitas ini.
- f. Dengan semakin bertambahnya jumlah komoditas yang akan diasuransikan, diusulkan agar perusahaan asuransi yang lain dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan program asuransi pertanian. Keterlibatan pemerintah, konsorsium perusahaan penyelenggara, dan kelompok tani/petani/peternak (PPP), serta dukungan pemanfaatan teknologi (sistem informasi terintegrasi dan drone) diperkirakan akan semakin mendorong terwujudnya perlindungan usaha pertanian yang berkesinambungan.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

📍 Jln. Tentara Pelajar No. 3B Bogor 16111 ☎️ 0251-8333964, 8325177 📠 0251-8314496
🌐 pse.litbang.pertanian.go.id ✉️ psekp@pertanian.go.id, psekplitbang@gmail.com
📺 psekp kentan 📷 psekp_kentan 🐦 @psekp_kementan